

## IMPLEMENTASI TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI PERKOTAAN

### IMPLEMENTATION OF INTEGRATED TRANSPORTATION IN CITIES

Samsul Ode\*, Margaretha Klara Mote, Taufiqurachman

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FEBIS, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sunter Permai Raya, DKI Jakarta

\*Koresponden email: [samsul.ode@uta45jakarta.ac.id](mailto:samsul.ode@uta45jakarta.ac.id)

#### ABSTRAK

Transportasi publik merupakan pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya transportasi publik ini terlihat pada semakin bertambah pesatnya pertumbuhan penduduk di pemukiman kota besar, dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk kebutuhan pelayanan jasa angkutan umum atau transportasi publik secara masal adalah sebagai solusi untuk membantu mobilitas masyarakat setiap waktu. Salah satu jenis transportasi publik yang dapat dijadikan pilihan utama untuk mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi publik di atas adalah Jak Lingko diketahui jumlah rute layanan *Jak Lingko* secara keseluruhan berjumlah 36 rute yang merupakan alat transportasi dengan beberapa keunggulan seperti waktu, biaya, akses, dan jangkauan trayek. Hadirnya *Jak Lingko* diharapkan dapat memberikan pelayanan transportasi yang lebih optimal dan menjadi solusi bagi transportasi publik di DKI Jakarta, serta dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat agar menggunakan transportasi publik untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari dan memudahkan masyarakat baik itu dengan adanya integrasi rute ataupun integrasi pembayaran

**Kata kunci:** Transportasi publik, *Jak-Lingko*, DKI Jakarta

#### ABSTRACT

*Public transportation is a basic service provided by the government to support the mobility of people and become something important for human life. The importance of public transportation can be seen in the rapid growth of population in large urban settlements, with increasing population growth in the need for public transportation services or mass public transportation is a solution to help people mobility at any time. One type of public transportation that can be used as the main choice to overcome the problems of the need for public transportation above is Jak Lingko. The total number of Jak Lingko service routes are 36 routes, which means this transportation have several advantages such as time, cost, access, and route coverage. The presence of Jak Lingko is expected to provide more optimal transportation services and be a solution for public transportation in DKI Jakarta, and Jak Lingko can give a major impact on the public to use public transportation to support their daily mobility and facilitate the community either by route integration or payment integration.*

**Keywords:** Public transportation, *Jak Lingko*, DKI Jakarta

#### PENDAHULUAN

Transportasi Publik merupakan pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya transportasi publik ini terlihat pada semakin bertambah pesatnya pertumbuhan penduduk di pemukiman kota besar, dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk kebutuhan pelayanan jasa angkutan umum atau transportasi publik secara masal adalah sebagai solusi untuk membantu mobilitas masyarakat setiap waktu. Salah satu jenis transportasi publik yang dapat dijadikan pilihan utama untuk mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi publik di atas adalah *Jak Lingko* yang merupakan alat transportasi dengan beberapa keunggulan seperti waktu, biaya, akses, dan jangkauan trayek.

Dilansir dari data Katadata (2019), penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 10,5 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 0,73% dari proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2018 yang sebanyak 10,4 juta jiwa. Jumlah penduduk perempuan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Data statistik transportasi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat total kendaraan yang terdaftar sebanyak 18 ribu unit di tahun 2016. Kendaraan tersebut tidak termasuk kendaraan milik pihak militer, dan kedutaan asing ekspatriat, serta kendaraan yang memiliki persentase terbesar adalah sepeda motor. Jumlah unit sepeda motor yang melintasi jalan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,3 juta atau 73,92%. Mobil penumpang menempati posisi dengan jumlah 3,5 juta unit atau

19,58%. Sementara penyumbang terkecil dari kendaraan khusus berjumlah 141,5 ribu unit atau 0,79%.

Kerumitan yang terkait dengan masalah transportasi di perkotaan diungkapkan oleh Aminah (2018) yang menyatakan bahwa kerumitan persoalan transportasi menyatu dengan variabel pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah kendaraan bermotor yang bertambah melebihi kapasitas jalan, dan perilaku masyarakat yang masih mengabaikan peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kegagalan sistem transportasi mengganggu perkembangan suatu wilayah/kota, mempengaruhi efisiensi ekonomi perkotaan, bahkan kerugian lainnya. Isu-isu ketidaksepadanan misalnya, dapat berakibat pada masalah sosial, kemiskinan dan kecemburuan sosial. Dampak dari kegagalan sistem transportasi antara lain pembangunan jalan yang menyingkirkan masyarakat akibat pembebasan lahan, perambahan ruang-ruang jalan oleh pedagang kaki lima, penggunaan ruang jalan untuk parkir secara ilegal, dan makin terpinggirkannya angkutan tradisional seperti becak dan sebagainya yang berpotensi memicu kemiskinan kota. Kemiskinan telah menjerat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akibat dari sistem transportasi yang tidak mampu melindungi mereka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa moda transportasi publik untuk menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat, diantaranya adalah Transjakarta, Kereta *Comuter Line*, *Mass Rapid Transit*, *Light Rapid Transit*, dan *Jak Lingko*. Dengan lima moda transportasi publik tersebut diharapkan mampu menunjang mobilitas masyarakat, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan permasalahan utama penggunaan moda transportasi publik di DKI Jakarta adalah pola pikir masyarakat yang berpikir bahwa transportasi publik kurang nyaman dan kurang efisien dalam menunjang mobilitas mereka, seperti masih tidak adanya *air conditioner* atau AC di kabin armada *Jak Lingko*, dan waktu perjalanan yang cukup panjang dari lokasi pengendapan hingga akhir titik pengantaran.

Dilansir melalui Techinasia (2019), Jakarta *Smart City* (JSC) menginisiasi program

Provinsi DKI Jakarta sejak Desember tahun 2014. Misi dari Jakarta *Smart City* adalah mewujudkan kota Jakarta baru yang informatif, transparan, serta mendukung kolaborasi menggunakan teknologi untuk pelayanan publik lebih baik. Saat ini JSC telah bekerja sama dengan beberapa startup lokal untuk menghadirkan berbagai layanan dan inovasi demi pelayanan publik yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, JSC kerap berkolaborasi dengan berbagai startup dan perusahaan berbagai skala demi menghadirkan layanan yang solutif dan efisien. Beberapa diantaranya adalah *Qlue*, *Trafi*, dan *Waze*. Sebagai salah satu startup yang telah bekerja sama sejak JSC dimulai, *Qlue* merasa inisiatif pemerintah menggandeng *startup* lokal dalam mengatasi permasalahan di Jakarta merupakan langkah yang bijak. Keberadaan program Jakarta *Smart City* diharapkan akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan informasi kondisi Jakarta ke masyarakat dan mempermudah kinerja aparat Pemprov DKI agar cepat merespons keluhan dari warga. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov DKI juga membentuk Unit Pengelola Jakarta *Smart City* yang bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Baru yang informatif dan transparan serta mendukung kolaborasi melalui pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Provinsi DKI Jakarta telah memiliki beberapa transportasi andalan melalui program *Smart city* yang terdiri dari 6 aspek yaitu *Smart Governance* (Pemerintahan yang Cerdas), *Smart People* (Masyarakat Cerdas), *Smart Living* (Pemukiman yang Cerdas), *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas), *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), dan *Smart Environment* (Lingkungan yang Cerdas). Salah satu aspek yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta adalah *Smart Mobility*. *Smart Mobility* adalah Mobilitas Cerdas, yang dimana pergerakan mobilitas warga masyarakat kota tersebut tertata dengan baik seperti penyediaan transportasi publik yang nyaman, aman, dan efektif, di Provinsi DKI Jakarta, salah satu implementasi dari *Smart Mobility* adalah beroperasinya Transjakarta, peneparan sejak tahun 2004. Sampai tahun 2019, telah tersedia 13 koridor Transjakarta yang telah beroperasi, ditambah

lagi dengan bus-bus pengumpan dan angkutan terintegrasi dari lokasi yang cukup jauh dengan lokasi halte *busway* serta bus-bus dari luar Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan Transjakarta.

Dalam perkembangannya muncul moda transportasi baru yang terintegrasi dengan transportasi publik lainnya yaitu Jak Lingko yang sebelumnya dikenal dengan nama *OK-Trip*. Kebijakan Jakarta *Smart City* dicetuskan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan diimplementasikan di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, sebagai program andalan kebijakan ini dilanjutkan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies Baswedan membuat terobosan baru untuk penyempurnaan penerapan sistem pembayaran elektronik dan layanan informasi transportasi publik dalam bentuk aplikasi *TijeKu*.

## METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data- data. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta fokus pada analisis penerapan. Sasaran dalam penelitian ini adalah hadirnya moda transportasi public terintegrasi Jak Lingko ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan memberikan dampak positif dalam pelayanan dasar transportasi ini..

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator seperti Ukuran dan Tujuan, Karakter Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi,

dan Dampak dari hadirnya Jak Lingko dalam memfokuskan penelitian ini, yang terdapat pada dua hal yaitu: (1). Implementasi Integrasi Jak Lingko di Jakarta Utara, Trayek Jembatan Hitam-Tanjung Priok. (2). Dampak implementasi kebijakan Jak Lingko di Jakarta Utara, Trayek Jembatan Hitam-Tanjung Priok. Peneliti menggunakan teknik analisis data dari konsep yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman dalam silalahi (2010) yang menyatakan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Transportasi publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki konsep transportasi modern, yang dimana transportasi publik yang terintegrasi dari metode pembayaran, dan rute. Dengan hadirnya *Jak-Lingko* lebih memudahkan mobilitas masyarakat karena *Jak - Lingko* memiliki rute perjalanan atau trayek perjalanan yang langsung masuk ke daerah pemukiman masyarakat. Konsep transportasi yang dimaksud ialah mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dengan *Jak-Lingko* lalu pindah ke Transjakarta atau *Mass Rapid Transit* atau *Light Rapid Transit* yang sudah terhubung dengan halte atau stasiun dan juga memiliki rute atau trayek yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dan juga dengan adanya transportasi publik yang terintegrasi ini rute angkutan menjadi memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari dan juga manajemen transportasi publik menjadi lebih baik diantaranya terdapat integrasi rute dan intgerasi metode pembayaran.

### Integrasi Rute

Integrasi rute adalah rute yang saling bersinergi serta saling berhubungan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dari transportasi yang satu kelainnya. Dalam hal ini peneliti membahas integrasi rute yang terdapat pada moda transportasi publik terintegrasi Jak Lingko khususnya trayek JAK77 Jembatan Hitam – Tanjung priok, yang dimana trayek JAK77 ini terintegrasi dengan Transjakarta di terminal Tanjung Priok dan bukan saja terintegrasi dengan terminal melainkan dalam rute JAK77

ini memiliki tempat pemberhentian yang bisa terintegrasi langsung dengan Trans-jakarta yaitu di halte Sunter Karya dan halte Danau Agung I. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan ternyata banyak sekali masyarakat yang menggunakan moda transportasi publik terintegrasi Jak Lingko untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Trans-jakarta di Terminal Tanjung Priok, dengan hasil temuan dilapangan integrasi rute moda transportasi terintegrasi Jak Lingko trayek JAK77 Jembatan Hitam - Tanjung Priok ke Transjakarta yang berada di beberapa titik pemberhentian trayek JAK77 seperti Halte Sunter Karya dan Danau Agung I dan di terminal Tanjung Priok berhasil. Dalam hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa dengan hadirnya moda transportasi publik terintegrasi *Jak-Lingko* ini khususnya trayek JAK77 sangat membantu masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke moda transportasi publik lainnya dalam hal ini ialah Transjakarta, karena pada dasarnya Jak Lingko hadir untuk melayani mobilitas masyarakat yang mengintegrasikan rute dengan moda transportasi publik lainnya yang ada di DKI Jakarta.

### **Integrasi Pembayaran**

Dalam era atau zaman kemajuan teknologi yang maju dengan pesat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ikut turut memperhatikan serta menyertakan teknologi-teknologi maju disetiap kebijakannya diantaranya adalah Moda transportasi publik terintegrasi *Jak-Lingko* ini dengan berkerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Operator PT. Transjakarta serta beberapa bank-bank BUMN ini untuk menciptakan sistem pembayaran dengan tekonologi digital atau *smart-card*, metode pembayaran *cashless* atau non-tunai, yang dimana proses penggunaan metode pembayarannya dengan melakukan Tap kartu yaitu Tap in dan Tap out, dan kartu elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran angkutan Jak Lingko ini diantaranya seperti *Flazz*, *E-money*, *Transjakarta Card*, *Jak Lingko Card*, dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat dan di-

ketahui bahwa metode pembayaran untuk menggunakan transportasi publik *Jak-Lingko* ini sudah menggunakan pembayaran dengan *Smart Card* atau Kartu Elektronik, yang dimana proses penggunaannya adalah *Tap in* dan *Tap Out* dan semua itu hanya bisa melakukan pembayaran *cashless* atau pembayaran digital tidak menerima cash. Dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik tetapi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan suatu temuan yang dimana metode pembayaran dengan menggunakan *Smart Card* ini tidak sepenuhnya memudahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu akses untuk menaiki moda transportasi publik terintegrasi Jak Lingko ini membuat masyarakat tersebut tidak bisa menaikinya.

Temuan kedua ialah masih banyak para supir atau driver yang tidak paham fungsi mengenai kartu akses yang di *Tap in* dan *Tap Out*, kebanyakan driver melakukan *Tap in* dan *Tap Out* secara bersamaan, yang dimana melakukan hal itu adalah suatu kesalahan. Karena seharusnya masyarakat melakukan Tap in ketika ingin menaiki dan lalu Tap Out ketika turun, jadi bisa terhitung bahwa masyarakat tersebut sejauh mana menaiki Jak Lingko dan tersimpan di data base dengan baik. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti banyak juga masyarakat merasa senang dengan sistem atau metode pembayaran menggunakan kartu elektronik atau *cashless*, karena banyak masyarakat pengguna moda transportasi publik terintegrasi Jak Lingko ini mengatakan lebih praktis dan tidak mempersulit masyarakat. Mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan kartu elektronik, mereka lebih merasa aman dikarenakan tidak perlu mengeluarkan uang atau dompet ditempat umum.

Terlebih lagi kartu elektronik atau smart card yang digunakan ialah cukup satu kartu elektronik, yang dimana dengan satu kartu elektronik dapat digunakan disemua moda transportasi publik terintegrasi yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu *Jak Lingko*, *Transjakarta*, *Commuter Line*, *Mass Rapid Transit*, dan *Light Rapid Transit*. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak bisa menaiki moda transportasi publik terintegrasi

Jak Lingko dikarenakan tidak memiliki kartu elektronik atau smard card sebagai kartu akses untuk menaiki moda transportasi publik terintegrasi Jak-Lingko, banyak masyarakat yang menyayangkan armada Jak Lingko tidak menyediakan kartu untuk bisa dibeli oleh masyarakat yang belum mempunyai kartu akses atau smard card.

Terlebih lagi pada hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah hanya dua kartu yang dapat mengakses atau digunakan untuk menaiki moda transportasi publik terintegrasi Jak Lingko yaitu *Jak Lingko Card* dan *Transjakarta Card*, ini adalah sebuah kekurangan yang sangat vital dikarenakan moda transportasi publik *Jak-Lingko* diharuskan menggunakan *smart card* tetapi metode pembayaran *smart card* belum bisa dikatakan maksimal.

### **Kolaborasi**

Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan model manajerial dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Collaborative governance*, telah datang untuk menyatukan para pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Implementasi transportasi public yang terintegrasi juga melibatkan beberapa stakeholder yang dimana diantaranya adalah Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Dalam hal proses implementasi transportasi publik terintegrasi khususnya *Jak-Lingko* ini juga melakukan kalaborasi pemerintah yang dimana melibatkan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam menjalankan implementasi program *Jak-Lingko*.

Pemerintah adalah pembuat kebijakan dan juga pelayan masyarakat, dalam hal ini pemerintah harus bisa hadir sebagai pembuat kebijakan yang bertanggung jawab, yang dimana pemerintah harus selalu mengawal proses dari kebijakan yang mereka keluarkan. Program implementasi transportasi publik terintegrasi Jak Lingko ini juga bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah hadir untuk mengawal dan memonitoring proses dari implementasi program Jak Lingko. Dalam hal ini pemerintah yang terkait

dalam transportasi publik ialah PT. Transjakarta sebagai atau selaku operator Jak Lingko dan Transjakarta yang dimana melakukan manajemen rute, pembayaran, dan data penumpang serta juga ikut melakukan monitoring rute, pembayaran, serta armada yang sedang berjalan. Lalu juga Dinas Perhubungan dan khususnya Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, dikarenakan trayek Jak Lingko JAK77 Jembatan Hitam - Tanjung Priok berada di wilayah pantauan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara yang dimana bertugas melakukan monitoring dan pengawasan serta penertiban aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Standar Pelayanan Minimal dari Operator, dan juga Standar Operasional Prosedur dari Operator.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan sebuah kolaborasi pemerintah antara Suku Dinas Perhubungan dengan pihak operator yaitu *PT. Transjakarta*. Dengan kalaborasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan dan *PT. Transjakarta* itu menguatkan sinergi antar pemerintah dalam men-sukseskan program implementasi transportasi publik terintegrasi Jak Lingko yang diantaranya hasil dari kalaborasi tersebut ialah dalam melakukan survei pembukaan jalan trayek baru untuk Jak Lingko.

Kolaborasi yang dilakukan pemerintah selalu menghadirkan pihak swasta didalamnya, transportasi publik yang dicanangkan atau dikeluarkan melalui kebijakan pemerintah tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri tanpa dukungan atau melibatkan pihak swasta. Dalam proses implementasi program transportasi public terintegrasi Jak Lingko, pemerintah juga melibatkan pihak swasta dalam pengadaan armada Jak Lingko yang dioperasikan. Pihak swasta yang dimaksud ialah koperasi- koperasi angkutan umum yang sudah lebih dulu menjadi transportasi publik sebelum hadirnya Jak Lingko ini. Koperasi swasta yang diantara sudah bergabung dan di wilayah Jakarta utara ialah Budi Luhur dan Koperasi Wahana Kalpika. Hadirnya armada-armada Jak Lingko dari beberapa koperasi yang sudah bergabung dengan Jak-Lingko atau PT. Transjakarta sebagai operator adalah suatu keuntu-

ngan bagi pemerintah dan operator karena dengan armada serta *driver* yang sudah ada dengan demikian pemerintah tidak perlu lagi mencari armada dan *driver* yang dibutuhkan.

Masyarakat selalu hadir dalam suatu program-program atau kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan, karena sejatinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat dan tujuannya adalah kepuasan masyarakat. Transportasi public terintegrasi *Jak-Lingko* ini hadir untuk masyarakat, tujuan hadirnya *Jak Lingko* ini ialah memudahkan mobilitas masyarakat dan juga memberikan fasilitas pelayanan transportasi publik yang efisien, nyaman, aman, dan murah. Dengan adanya *Jak-Lingko* transportasi publik dapat langsung menyentuh dan hadir dipemukiman masyarakat, jadi masyarakat sulit dalam menjalan mobilitasnya sehari-hari. Dengan partisipasi masyarakat pemerintah dapat menilai bahwa program yang dilakukan sukses atau tidak, karena dengan adanya antusiasme masyarakat program implementasi *Jak-Lingko* berhasil dikarenakan masyarakat banyak menggunakan *Jak Lingko* dan khususnya trayek *JAK77* rute Jembatan Hitam – Tanjung Priok. Dalam hasil penelitian yang dilakukan bahwa peranan masyarakat adalah suatu peranan yang sangat vital atau penting, karena semua program kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah hanya tertuju untuk kepuasan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang sudah dilaukan dan mendapatkan suatu temuan yaitu dengan hadirnya *Jak-Lingko* ini memudahkan masyarakat yang dimana pelayanan. mobilitas masyarakat menjadi optimal dikarenakan *Jak Lingko* dapat menyentuh pemukiman yang sebelumnya tidak dilewati angkutan, dengan hadirnya *Jak Lingko* Trayek *JAK77* ini bisa mengakomodir wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh angkutan umum, seperti wilayah Jalan Sunter Muara II, Sunter Muara, Metro Kencana Raya, Bisma Raya, Papanggo IV, Warakas gang 10, dan Warakas gang 13. Dan sekarang dengan hadirnya *Jak Lingko* wilayah tersebut dapat tersentuh *Jak Lingko* dan memudahkan mobilitas masyarakat sehari-hari.

## KESIMPULAN

Ketersediaan armada *Jak Lingko* khususnya trayek *JAK77* yang kurang membuat masyarakat menunggu cukup lama kedatangan armada *Jak Lingko* untuk menjemput penumpang, diharapkan kedepannya pemerintah memerhatikan hal ini agar kedepannya *Jak Lingko* menjadi lebih cepat dalam menjemput penumpang agar tidak membuat penumpang menunggu terlalu lama di Halte. Metode pembayaran sudah bisa dikatakan baik dengan menggunakan smart card, namun masih terdapat masalah khususnya *Jak Lingko* trayek *JAK77* karena tidak semua kartu elektronik dapat digunakan untuk menaiki moda transportasi *Jak Lingko* ini. Melainkan hanya dua kartu saja yang dapat digunakan yaitu *Jak Lingko Card*. Dan juga pemerintah harus memikirkan karena moda transportasi bukan hanya dinikmati masyarakat DKI Jakarta saja, jadi harus diperhatikan untuk menyediakan kartu elektronik untuk dibeli saat masyarakat tidak memiliki tetapi ingin menaiki *Jak Lingko*.

Lokasi pemberhentian dapat dikatakan sudah baik dikarenakan para supir armada *Jak Lingko* benar-benar mengikuti Standar Pelayanan Minimal yang sudah diberikan oleh pihak operator, namun masih ada permasalahan yaitu tempat pemberhentian *Jak Lingko* masih terdapat di bahu jalan dan itu mengganggu pengguna lalu lintas lainnya dan kerap terjadi kemacetan karena itu. Diharapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta memerhatikan perihal ini dikarenakan cukup penting terkait kenyamanan dan keamanan penumpang ketika ingin naik ataupun turun dari moda transportasi terintegrasi *Jak Lingko*.

Lokasi pengendapan atau tempat pemberhentian akhir dari armada *Jak Lingko* saat ini masih bisa dikatakan kurang layak dikarenakan hanya seperti tempat lahan parkir dan itu kurang nyaman bagi penumpang yang turun hingga akhir pemberhentian. Diharapkan pemerintah dapat memberikan inovasi untuk lokasi pengendapan agar lebih baik lagi dan bisa seperti terminal mini yang modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta. PT. Rebnika Cipta.
- Aminah, S. 2018. Transportasi publik dan aksesibilitas masyarakat perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil*, 9(1), 1142-1155.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dagun. Save M. 2006. *Busway, Terobosan Penanganan Transportasi Jakarta*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Hardiansyah .2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Hadari Nawawi, 1984. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta. Gunung Agung.
- Kamaluddin. 2003. *Ekonomi Transportasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media
- Miro, Fidel. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*. Erlangga. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Pratama, I Putu Agus Eka. 2014. *Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya*. Informatika. Bandung.
- Sedarmayanti, 2003, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak. dkk. 2011 *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ulum, M.Chazienul dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press.
- Ansell, Chris &, Alison Gash (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Connick, Sarah, and Judith Innes. 2003. Outcomes of collaborative water policy making: Applying complexity thinking to evaluation. *Journal of Environmental Planning and Management*
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Firdausi, Mutiara, 2016, *Pengembangan Penjadwalan Model Integrasi Antara Angkutan Intermoda Trans Jogja Dengan Jadwal Penerbangan di Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta*.
- Indrashanty, Anzy, Nugroho, Hernawan, 2015, *Pengembangan Angkutan Pemadu Moda Terminal Dhaksinarga Wonosari-Bandara Adisucipto-Stasiun Tugu*. Puslitbang Manajemen Transportasi Multimoda.
- Pratiwi, Y., dan Sakarov, O. D. 2014. *Perbedaan Implementasi Smart City di Negara Berkembang dan Negara Maju Kasus: Indonesia dan Korea Selatan*. Seminar Nasional Smart City 2014. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Puspita, Nadia R., dan Dwi, Purnomo S. 2013. *Evaluasi Kinerja Batik Solo Trans (Studi Kasus: Koridor I Kartasura-Palur, Surakarta)*. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Suweda, I Wayan, Arisena, Kadek Wikarma, 2012 *Analisis tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Sarbagita berdasarkan BOK, ATP, dan WTP*. Fakultas Teknik, Universitas Udayana.